KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fahri : Blue Print Pembangunan Parlemen Modern Selesai Disusun
Tanggal : Kamis, 14 Desember 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Fahri: Blue Print Pembangunan Parlemen Modern Selesai Disusun



Tim Implementasi Reformasi DPR telah menyelesaikan penyusunan blue print pembangunan Parlemen Modern. Blue print itu memuat agenda strategis reformasi DPR tahun 2014-2019 yang mencakup penguatan sistem kedewanan, sistem pendukung, dan kemandirian kelembagaan.

WAKIL Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, bagian penting dari penguatan DPR adalah penataan kawasan parlemen. Instrumen itu mencakup pembangunan alun-alun demokrasi DPR, museum, perpustakaan, ruang kerja, dan poliklinik. Anggarannya pun telah disetujui dalam DIPA DPR tahun 2018.

"Diharapkan peletakan batu pertama pembangunan kawasan parlemen dilaksanakan pada awal tahun 2018. Kami menargetkan, pembangunan itu selesai sebelum keanggotaan DPR periode 2014-2019 berakhiri," ujar Fahri Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penataan kelembagaan DPR dimulai dari perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Tim Implementasi DPR telah menugaskan Badan Keahlian DPR menyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU tersebut.

"Perubahan ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang DPR. Hal tersebut didukung oleh adanya pengaturan khusus mengenai anggaran menuju kemandirian DPR dan sistem pendukung lainnya," jelas Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR ini.

Untuk mewujudkan Parlemen Modern, lanjut dia, DPR mengutus sejumlah delegasi Tim Implementasi Reformasi ke sejumlah Negara. Diantaranya, ungkap dia, mengunjungi dan bertemu dengan beberapa pihak dan institusi di Washington DC dan New York, Amerika Serikat (AS). Kunjungan tersebut berlangsung mulai hari Rabu, 1 November sampai Jumat, 3 November 2017.

"Pertemuan pertama dilakukan dengan Clerk of House Representatives dan beberapa anggota Parlemen dari Partai Republik dan Demokrat AS. Kongres Amerika menjadi salah satu contoh bagi parlemen Indonesia, karena sistemnya hampir sama," kata dia.

Fahri menegaskan, penguatan Parlemen sangat penting untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Keberadaan Parlemen yang kuat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan presiden dalam sistem presidensial.

"Sistem yang berlaku di Indonesia sama dengan Amerika Serikat. Parlemen yang kuat membentengi demokrasi dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dari cabang eksekutif," tandasnya. ■ TIM/ONI



